

Desak Audit Pajak Penerangan

■ Lampu Jalan Tak Berfungsi

KETAPANG, TRIBUN - Ketua Badan Pimpinan Kabupaten (BPK) Dewan Pemantau Penyelenggara Negara Indonesia (DPPNI) Kabupaten Ketapang, A Rahman Benjol, meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit terhadap PPJ (Pajak Penerangan Jalan) yang diterima Pemda Ketapang.

Rahman mengemukakan, angka yang dibayar masyarakat dari PPJ jumlahnya tidak sedikit, namun hingga kini masih ada saja fasilitas umum, seperti lampu penerang jalan yang tidak berfungsi dengan baik. Bahkan menurutnya, beberapa di antaranya sudah bertahun-tahun tidak berfungsi, namun tidak diperbaiki.

"Kami meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan. Harus diaudit ke mana aliran dana yang dibayar masyarakat melalui PPJ, karena saat ini banyak jalan-jalan dalam kondisi gelap," ujar Rahman kepada *Tribun*, Senin (5/9).

Ia menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah menyediakan penerangan jalan. "Apa alasan lampu penerang jalan tidak berfungsi. Kami meminta BPK mengauditnya. Pemerintah seharusnya tidak ada alasan lagi ada sejumlah ruas jalan gelap dan berpotensi terjadinya tindak kriminalitas, karena masyarakat Ketapang telah membayarnya," pungkas Rahman.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, sedikitnya

” Kami meminta BPK turun tangan. Harus diaudit ke mana aliran dana yang dibayar masyarakat melalui PPJ, karena saat ini banyak jalan-jalan dalam kondisi gelap. ”

A RAHMAN BENJOL

Ketua BPK-DPPNI

terdapat 81 lampu penerang jalan di pusat Kota Ketapang yang tidak menyala. Ruas JI HOS Cokroaminoto hanya memiliki satu lampu jalan. JI KS Tubun tetap gelap, karena hanya beberapa tiang listrik yang memiliki lampu. JI Suprpto sebagian besar tidak memiliki lampu jalan, hanya mengandalkan pencahayaan papan reklame, dan lampu dari ruko-ruko.

Jembatan Pawan I, empat bola lampunya tidak berfungsi, Kampung Kaum-Tuan-Tuan,

sebanyak 25 lampu tidak berfungsi, beberapa di antaranya di tikungan, tempat ibadah, serta jalan berpasir.

JI Sisingamangaraja-JI Pelabuhan Sukabangun 18 bola lampu tidak berfungsi, JI Suto-mo empat bola lampu tidak berfungsi, JI Payakumang 28 lampu tidak berfungsi, dan JI DI Panjaitan dua bola lampu tidak berfungsi.

Manajer PLN Cabang Ketapang, Yusuf S, mengungkapkan, pihaknya kini dibebani

dengan lampu penerang jalan liar, yang dipasang sendiri oleh masyarakat, tanpa sepengetahuan PLN, menggunakan listrik PLN, namun tidak dibayar.

"Nah, itu juga masalah kita. Pemda tidak mau membayar, karena itu PJU swadaya masyarakat dengan mengambil listrik PLN. Kita rugi karena itu, tapi mau diapakan lagi, terutama di desa-desa belum ada PJU nya," ungkap Yusuf.

Yusuf juga mengungkapkan, sejauh ini banyak warga melapor ke PLN terkait PJU yang tidak berfungsi lagi.

"Ya sebenarnya bukan bagian kami, tapi karena itu masyarakat telah melapor ke kami, akhirnya pengantian bola lampunya terkadang kami lakukan juga," pungkas Yusuf. (pio)



Gusti Kamboja

Ketua DPRD Ketapang

Hak Konsumen

PAJAK Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak daerah sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap tahun pajak daerah tersebut, termasuk PPJ, digunakan Pemda untuk pembiayaan umum daerah. Idealnya, memang harus dikeluarkan lagi untuk lampu PJU di tempat-tempat umum.

Masyarakat pengguna PLN adalah objek pajak yang merupakan konsumen yang harus dilindungi hak-haknya, berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen. Audit yang diusulkan sejumlah masyarakat itu boleh-boleh saja dilakukan, pas atau tidak penerimaan dan

pengeluarannya.

Tetapi lebih dari itu yang perlu diatur oleh Pemda adalah agar penerimaan PPJ itu harus dibelanjakan untuk lampu, dan perbaikan penerangan umum, karena di sana ada hak konsumen.

Terkait soal imbang atau tidaknya pembayaran yang dilakukan masyarakat, dan pelayanan oleh instansi terkait dalam hal penerangan jalan itu relatif. Tapi mestinya yang sudah ada sekarang harus dirawat, kalau pemerintah belum mampu menambah lampu PJU mestinya yang ada harus dirawat. (pio)